



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 60 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 6965/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang ...



4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2022**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 133.354.604.605,54
2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.353.445.554.542,44
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 576.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 1.487.376.159.147,98</b>

b. Belanja

1. Belanja Operasi	
a. Belanja Pegawai	Rp. 666.209.948.389,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 447.613.977.355,00
c. Belanja Bunga	

d. Belanja...



d. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
e. Belanja Hibah	Rp.	11.722.378.525,00
f. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.746.900.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.127.293.204.269,00</b>
2. Belanja Modal		
a. Belanja Modal Tanah	Rp.	0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	27.882.681.373,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	41.114.537.184,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	79.460.397.617,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	9.207.826.478,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp.</b>	<b>157.665.442.652,00</b>
3. Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.000.000,00
4. Belanja Transfer		
a. Belanja Bagi Hasil	Rp.	4.425.057.932,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	238.445.842.203,00
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>Rp.</b>	<b>242.870.900.135,00</b>
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	320.418.641.284,49
2. Pengeluaran	Rp.	0,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp.</b>	<b>320.418.641.284,49</b>
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>279.961.253.376,47</b>

#### **Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

#### **Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5...

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



THI JOYI, S.H., M.M.

NIP. 19710603 198803 1 005

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 8 September 2023

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

ttd

**REZITA MEYLANI YOPI**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 8 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

**H. HENDRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 60

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.  
NIP. 19710603 199803 1 005

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 8 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

**H. HENDRIZAL**

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 8 September 2023

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

ttd

**REZITA MEYLANI YOPI**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 30

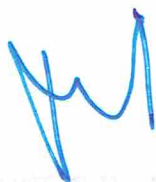
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	48,790,190,441.00	57,007,766,901.20	-8,217,576,460.20	116.84
4	Pendapatan Retribusi Daerah	3,683,559,700.00	3,294,427,874.00	389,131,826.00	89.44
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,101,143,494.00	1,328,315,866.00	-227,172,372.00	120.63
6	Lain-lain PAD yang Sah	72,456,250,099.00	71,724,093,964.34	732,156,134.66	98.99
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>126,031,143,734.00</b>	<b>133,354,604,605.54</b>	<b>-7,323,460,871.54</b>	<b>105.81</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,232,639,242,564.00	1,220,458,776,109.00	12,180,466,455.00	99.01
11	Pendapatan Transfer Antar Daerah	118,975,830,099.00	132,986,778,433.44	-14,010,948,334.44	111.78
12	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>1,351,615,072,663.00</b>	<b>1,353,445,554,542.44</b>	<b>-1,830,481,879.44</b>	<b>100.14</b>
13					
14	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
15	Pendapatan Hibah	618,000,000.00	576,000,000.00	42,000,000.00	93.20
16	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	0.00
18	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>618,000,000.00</b>	<b>576,000,000.00</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>93.20</b>
19					
20	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,478,264,216,397.00</b>	<b>1,487,376,159,147.98</b>	<b>-9,111,942,750.98</b>	<b>100.62</b>
21					
22	<b>BELANJA</b>				
23	<b>BELANJA OPERASI</b>				
24	Belanja Pegawai	759,087,286,710.00	666,209,948,389.00	92,877,338,321.00	87.76
25	Belanja Barang dan Jasa	507,075,912,250.00	447,613,977,355.00	59,461,934,895.00	88.27
26	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Belanja Hibah	11,914,996,336.00	11,722,378,525.00	192,617,811.00	98.38
29	Belanja Bantuan Sosial	3,548,680,000.00	1,746,900,000.00	1,801,780,000.00	49.23
30	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1,281,626,875,296.00</b>	<b>1,127,293,204,269.00</b>	<b>154,333,671,027.00</b>	<b>87.96</b>
31					
32	<b>BELANJA MODAL</b>				
33	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,883,126,296.00	27,882,681,373.00	3,000,444,923.00	90.28
35	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43,347,236,708.00	41,114,537,184.00	2,232,699,524.00	94.85
36	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81,395,239,266.00	79,460,397,617.00	1,934,841,649.00	97.62
37	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,996,782,290.00	9,207,826,478.00	2,788,955,812.00	76.75
38	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>167,622,384,560.00</b>	<b>157,665,442,652.00</b>	<b>9,956,941,908.00</b>	<b>94.06</b>
39		0.00	0.00	0.00	0.00
40	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
41	Belanja Tidak Terduga	1,696,020,205.00	4,000,000.00	1,692,020,205.00	0.24
42	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1,696,020,205.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>1,692,020,205.00</b>	<b>0.24</b>
43					
44	<b>BELANJA TRANSFER</b>				
45	Belanja Bagi Hasil	4,442,090,358.00	4,425,057,932.00	17,032,426.00	99.62
46	Belanja Bantuan Keuangan	239,195,368,048.00	238,445,842,203.00	749,525,845.00	99.69



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	BERTAMBAH / BERKURANG	%
47	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	243,637,458,406.00	242,870,900,135.00	766,558,271.00	99.69
48	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,694,582,738,467.00</b>	<b>1,527,833,547,056.00</b>	<b>166,749,191,411.00</b>	<b>90.16</b>
49					
50	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-216,318,522,070.00</b>	<b>-40,457,387,908.02</b>		
51					
52	<b>PEMBIAYAAN</b>				
53	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
54	Penggunaan SILPA	216,318,522,070.00	320,236,014,138.49	-103,917,492,068.49	148.04
55	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
58	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	182,627,146.00	-182,627,146.00	0.00
59	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
60	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>216,318,522,070.00</b>	<b>320,418,641,284.49</b>	<b>-104,100,119,214.49</b>	<b>148.12</b>
61					
62	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
63	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
64	Penyertaan Modal Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
68	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
69	<b>Pembiayaan NETTO</b>	<b>216,318,522,070.00</b>	<b>320,418,641,284.49</b>		
70					
71	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>0.00</b>	<b>279,961,253,376.47</b>		

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



TTT JUSTI S.H., M.M.  
HP. 08770653 199803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

REZITA MEYLANI YOPI



## KABUPATEN INDRAGIRI HULU

## PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2022

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lampiran 1.1 : Peraturan Bupati  
Kabupaten Indragiri Hulu  
Nomor : 60 Tahun 2023  
Tanggal : 8 September 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (berkurang) Jumlah	%	Dasar Hukum	Keterangan
		Anggaran	Realisasi				
4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	100.00		
1.01.00.2.01.01	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	100.00		
1.01.00.2.01.01.42	PENDAPATAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	100.00		
1.01.00.2.01.01.4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	100.00		
1.01.00.2.01.01.420101	Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	100.00		
1.01.00.2.01.01.42010104	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0.00	0.00	0.00	100.00		
1.01.00.2.01.01.420101040001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0.00	0.00	0.00	100.00		
5	BELANJA DAERAH	498,568,190,043.00	451,926,208,772.00	46,641,981,271.00	90.64		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	345,789,937,178.00	313,676,793,103.00	32,113,144,075.00	90.71		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	340,139,211,567.00	308,748,903,639.00	31,390,307,928.00	90.77		
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	340,139,211,567.00	308,748,903,639.00	31,390,307,928.00	90.77		
1.01.01.2.02.01.51	BELANJA OPERASI	340,139,211,567.00	308,748,903,639.00	(31,390,307,928.00)	90.77		
1.01.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	340,139,211,567.00	308,748,903,639.00	(31,390,307,928.00)	90.77		
1.01.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	212,292,910,213.00	194,068,428,203.00	(18,224,482,010.00)	91.42		
1.01.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	156,501,257,403.00	145,700,312,806.00	(10,800,944,597.00)	93.10		
1.01.01.2.02.01.5101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	144,166,550,403.00	137,999,278,806.00	(6,167,271,597.00)	95.72		
1.01.01.2.02.01.5101010002	Belanja Gaji Pokok PPK	12,334,707,000.00	7,701,034,000.00	(4,633,673,000.00)	62.43		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (berkurang)		Dasar Hukum	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	%		
8.01.06.2.01.06.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,250,000.00	2,010,000.00	(240,000.00)	89.33		
<b>8.01.06.2.01.06.510204</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>137,698,000.00</b>	<b>66,976,600.00</b>	<b>(70,721,400.00)</b>	<b>48.64</b>		
<b>8.01.06.2.01.06.51020401</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>137,698,000.00</b>	<b>66,976,600.00</b>	<b>(70,721,400.00)</b>	<b>48.64</b>		
8.01.06.2.01.06.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101,448,000.00	54,776,600.00	(46,671,400.00)	53.99		
8.01.06.2.01.06.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,250,000.00	12,200,000.00	(24,050,000.00)	33.66		
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(9,169,944,037.00)</b>	<b>(7,521,016,362.00)</b>	<b>(1,648,927,675.00)</b>	<b>82.02</b>		

Selama sesuai dengan aslinya

KETABLA BAGIAN HUKUM

ttd

BUPATI INDRAGIRI HULLU

REZITA MEYLANI YUPI

TRISOGI, S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 903